



Artikel Penelitian

Received: 2 November 2023
Revised: 10 November 2023
Accepted: 10 November 2023

Kata Kunci:

Efektivitas;
Penerapan;
Akuntansi Aset Tetap

Keywords:

Effectiveness;
Application;
Fixed Asset
Accounting

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital:
Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Ali Supriadi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah
Palu, Indonesia

EMAIL

ali.supriadi@gmail.com

OPEN ACCESS

E-ISSN 2623-2022

Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala

The Effectiveness Implementation of Fixed Asset Accounting Systems and Procedures at the Donggala Regency Regional Financial and Asset Management Agency

Ali Supriadi^{1*}, Sri Haryani², Imam Nurhardiyanto³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset tetap pada pemerintah daerah Kabupaten Donggala. Selain itu, untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan Aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Donggala dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan aset, sehingga dapat bermanfaat bagi pengelola Barang (BPKAD Kabupaten Donggala) agar lebih memperhatikan pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap dalam meningkatkan opini BPK dari WDP menjadi WTP. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan internet searching. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian serta mengkajinya dengan kajian Pustaka yang telah ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah. Walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang, Pemanfaat Barang Milik Daerah hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Donggala tidak melakukan pengamanan hukum.

Abstract: This research aims to determine the implementation of management of Regional Property/Fixed Assets in the regional government of Donggala Regency. Apart from that, to determine the suitability of the management of fixed assets in the Donggala Regency Government with the Minister of Home Affairs Regulation no. 19 of 2016 concerning Technical Guidelines for Management of Regional Property and what obstacles are faced in implementing asset management so that it can be useful for Property Managers (BPKAD Donggala Regency) to pay more attention to the management of Regional Property/Fixed Assets in increasing the opinion of the Financial Audit Agency from Fair to Fair. Exceptions become Reasonable Without Exceptions. In collecting this data, observation, interviews, literature study, documentation and, internet searching were used. Data collection in this research was carried out by going directly to the research location and reviewing it using existing literature studies. The results of this research indicate that the management of Fixed Assets/Regional Property carried out by the Regional Government of Donggala Regency as a whole has been carried out optimally and by following the Regional Property Management Cycle. Even though everything has not been implemented optimally, such as delays in reporting reports at the goods user level, Utilization of Regional Property is only limited to the use of loan-to-use, and the security carried out by the Donggala Regency BPKAD does not provide legal safeguards.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Pages: 1478-1485

Doi: 10.56338/jks.v6i11.4311

LATAR BELAKANG

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kinerja. Hal ini juga memberi dampak pada pengaturan sistem keuangan pemerintahan di daerah. Otonomi daerah menuntut pemerintahan daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik yang didasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban demi terciptanya good governance.

Sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK -SKPD). Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan aset.

Aset pemerintah daerah merupakan salah satu elemen dari neraca pemerintah daerah. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang biasa diperoleh. Kemudian seberapa nyaman tinggal di daerah tersebut terkait dengan kelengkapan dan prasarana publik, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya.

Suatu tantangan bagi pemerintah Kota Donggala untuk dapat memenuhi kewajiban dalam hal pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang baik dan benar sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara. Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan berbeda, bergantung pada karakter aset tersebut. Sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya, karena itu pengelolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan financial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut bisa menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Aset jika tidak di kelola dengan semestinya, aset tersebut menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah yang isinya sebagai berikut. “Untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik”

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. SIMDA Keuangan dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja. P. Siagian (dalam Ridwan, 2009) menyatakan bahwa “Pemanfaatan teknologi informasi bukan lagi merupakan kemewahan akan tetapi sudah merupakan keharusan. Efisien, efektifitas, dan produktivitas kerja organisasi atau perusahaan baik pada tingkat individu, kelompok maupun pada tingkat organisasi atau perusahaan sebagai keseluruhan dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi tersebut.”

BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengemban amanat Pembina penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 mengembangkan SIMDA Keuangan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka mengemban amanat PP Nomor 56 Tahun 2005 untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan SIMDA Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala telah berhasil menerapkan SIMDA Keuangan secara menyeluruh. Tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.

Namun dalam Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) Keuangan terdapat beberapa masalah terkait penempatan akun klasifikasi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala. Hal ini tidak signifikan namun mempengaruhi laporan Keuangan unit kerja. Sehingga hal tersebut perlu diteliti bagian system dan prosedur aset tetap.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif Deskriptif. Kualitatif Deskriptif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Analisis data dalam penelitian kualitatif sebenarnya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Namun dalam kenyataannya, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

HASIL

Dokumen Sumber adalah semua berkas penting yang dihasilkan dari siklus pengelolaan aset tersebut maupun berkas penting yang mendasari suatu siklus atau tahapan untuk dilakukan. Dokumen sumber ini diperlukan untuk menjadi bukti dalam proses pengelolaan maupun penyampaian akhir dari suatu hasil pelaporan kekayaan daerah yang mempengaruhi penyajian jumlah dan nilai aset suatu daerah. Daftar dokumen sumber yang menjadi acuan dalam kelengkapan pada penelitian ini tercermin pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dokumen Sumber Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016: 1) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, 2) Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, 3) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah, 4) Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, 5) Daftar Barang Pengguna / Daftar Barang Kuasa Pengguna, 6) Kartu Inventaris Barang, 7) Daftar Barang Milik Daerah, 8) Buku Inventaris Dan Buku Induk Inventaris, 9) Laporan Barang Semesteran Dan Tahunan, 10) Laporan Barang Milik Daerah, 11) Surat Perjanjian Pinjam Pakai, 12) Bukti Kepemilikan Atas Nama Pemerintah Daerah, 13) Daftar Hasil Pemeliharaan Barang, 14) SK Penghapusan, 15) SK Pemindah tangan, 16) SK Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Penjelasan di atas, kelengkapan dokumen sumber yang ada pada bidang aset BPKAD Kabupaten Donggala sesuai hasil wawancara dan beberapa dokumen contoh yang diberikan kepada peneliti dapat dilihat pada:

Tabel 1. Kelengkapan Dokumen Sumber

No.	Daftar Dokumen	Ada(✓)/ Tidak (X)	Keterangan
1.	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	✓	Disertai contoh dokumen
2.	Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	✓	Disertai contoh dokumen
3.	Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	✓	Dari RKBMD dihasilkan DPA dan langsung menjadi DKBMD
4.	Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	✓	Dari RKPBMMD dihasilkan DPA
5.	Daftar Barang Pengguna / Daftar Barang Kuasa Pengguna	x	Tidak diberikan contoh dokumen
6.	Kartu Inventaris Barang	✓	Diberikan Contoh Dari KIB A-F
7.	Daftar Barang Milik Daerah	✓	Rekapitulasi Dari KIB A-F
8.	Buku Inventaris Dan Buku Induk Inventaris	✓	Diberikan contoh buku inventaris dari 1 unit Organisasi
9.	Laporan Barang Semesteran Dan Tahunan	✓	Diberikan contoh laporan semesteran dan tahunan
10.	Laporan Barang Milik Daerah	✓	Rekapitulasi LBS dan LBT
11.	Surat Perjanjian Pinjam Pakai	✓	Diberikan contoh surat perjanjian pinjam pakai tanah dan bangunan.
12.	Bukti Kepemilikan Atas Nama Pemerintah Daerah	✓	Diberikan contoh SK dan sertifikat tanah
13.	Hasil Pemeliharaan Barang	✓	Hasil Pemeliharaan gedung kantor
14.	SK Penghapusan	✓	Diberikan Sk penghapusan
15.	SK Pemindahtanganan	✓	Diberikan SK hibah tanah

16.	SK Status Penggunaan Barang Milik Daerah	Diberikan SK Status penggunaan Kendaraan
-----	--	--

Kelengkapan dokumen sumber tersebut diatas mensyaratkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dari segi administratif. Akan tetapi Pengelolaan aset negara Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 27 Tahun 2014 adalah tidak sekedar *administrative* semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset Negara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. (Yusuf, 2010: 31) menyatakan siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset.

DISKUSI

Siklus pengelolaan aset tetap adalah rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang merupakan tindakan konkret terhadap daerah dibawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2016. Tugas pokok dan fungsi yang wajib dilakukan oleh Bidang Aset adalah mengusahakan untuk lebih baik membuat administrasi pengelolaan aset tetap serta bertindak sebagai Pembantu Pengelola.

Permendagri No. 19 Tahun 2016 menyatakan ada 13 siklus yang harus dilalui dalam pengelolaan aset namun hanya 9 siklus pengelolaan aset tetap yang melibatkan BPKAD sebagai pembantu pengelola. Pembantu pengelola adalah unit kerja yang membantu pengelola (Sekretaris Daerah) untuk meneliti, menghimpun laporan bahkan menjadi penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan pengelolaan barang milik daerah. 9 siklus yang lain tetap dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala untuk pengelolaan yang baik dan benar, serta dilakukan oleh SKPD sebagai unit organisasi yang menggunakan (pengguna) barang milik daerah untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD beserta pelaksana teknis sebagai kuasa pengguna.

Tabel 2. Kesimpulan Evaluasi Sistem dan Prosedur Aset Tetap/ Barang Milik Daerah

No	Sistem Pengelolaan Aset/Barang milik Daerah	Permendagri No. 19 tahun 2016	BPKAD Kab. Donggala	Keterangan
1	Perencanaan Kebutuhan	Meneliti dan menghimpun DKBMD	Telah di rencanakan sesuai kebutuhan	Sesuai
2	Perencanaan, penganggaran dan pemeliharaan	Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran	Telah penerimaan, penyimpanan dan Penyaluran	Sesuai
3	Penggunaan	Inventaris, digunakan untuk tugas dan fungsi	Telah digunakan untuk tugas pokok dan Fungsi	Sesuai Inventaris, digunakan untuk tugas pokok dan Fungsi

4	Penatausahaan	Melakukan pencatatan, pendaftaran dan pelaporan.	Melakukan pencatatan, pendaftaran dan Pelaporan	Sesuai
5	Pemanfaatan	Pinjam pakai, Kerjasama Bagun guna serah, Bangun serah guna.	Sewa, Pernah melakukan pinjam pakai.	Sesuai
6	Pengamanan dan pemeliharaan	Pengamanan dan Penggunaan Pemeliharaan tanpa bentuk dan keindahan.	Adiministratif Fisik, pengamanan dan penggunaan Fisik	Sesuai
7	Pemeriksaan dan Pengawasan	Pemantauan, investigasi	penertiban dan Telah pemantauan, Penertiban dan Investigasi	Sesuai
8	Sanksi dan Ganti Rugi	Kelalaian penyalahgunaan/pe atas pengelolaan	dan Tidak Kelalaian penyalahgunaan/pelanggaran atas pengelolaan Barang	Sesuai dan
9	Penghapusan	Mengusulkan aset yang untuk dihapus dan pencatatan terhadap barang yang dihapuskan.	Mengusulkan aset yang layak untuk dihapus dan melakukan pencatatan terhadap barang yang dihapuskan.	Sesuai

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem dan prosedur Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran, serta perencanaan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan penerimaan sesuai dengan prosedur kemudian barang yang diterima disimpan ditempat penyimpanan sebelum barang disalurkan kepada unit-unit organisasi.

Sistem dan prosedur Penatausahaan sudah Efektif sesuai dengan peraturan yang ada di kerangka fikir. Dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan pencatatan dan pendaftaran barang sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB).

Sistem dan prosedur Pengamanan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan pengamanan secara administrasi dan fisik serta melakukan beberapa bentuk pemeliharaan yang disesuaikan dengan jenis barang.

REKOMENDASI

Rekomendasi penelitian ini adalah Fungsi aset tetap penanggung jawab atas pengelolaan aset tetap perusahaan dalam penempatan, pemindahan dan penghentian pemakaian aset tetap.

Instansi BPKAD dapat lebih maksimal lagi dalam menerapkan Efektivitas Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap.

Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait penerapan sistem dan prosedur aset tetap dapat lebih ditingkatkan lagi pada sistem prosedur akuntansi secara keseluruhan utamanya mengenai SIMDA.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Ni Made Marlita Puji. 2014. Pengaruh Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Dan Kesesuaian Tugas Pada Kinerja Karyawan. Jurusan Akuntansi: Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
- Athar, Rima Nazriyati. 2015. Analisis Penerapan Sitem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau. Jurusan Akuntansi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Cahyono, Anjung Budi, Rajindra Rajindra, and Haris Abd Kadir. 2020. "Analysis of Data Management in Sigi District Statistics Center." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 2(4): 212–18.
- Fauziah. 2011. Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Lima Puluh Kota (studi kasus pada badan kepegawaian daerah). Jurusan Akuntansi: Universitas Andalas.
- Kadir, Haris Abd, Rajindra Rajindra, Hazizah Hazizah, and Hasmawati Hasmawati. 2020. "Analysis of the Leadership of Mother of Paud in Early Childhood Education in Sigi Biromaru District." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 2(2): 64–70.
- Kalape, Dian Anggriani, Rajindra Rajindra, and Sirajudin Sirajudin. 2018. "PENGARUH NILAI PELANGGAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT. BANK MANDIRI CABANG PALU SAM RATULANGI." *Jurnal Kolaboratif Sains* 1(1).
- Lukman, Andi, Rajindra Rajindra, and Rukhayati Rukhayati. 2020. "Analysis of the Implementation of Discipline for State Civil Servants at the Office of Community and Village Empowerment, Pasangkayu Regency." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 2(4): 219–24.
- Makagansa, Marcella Daufy Evita. 2015. Evaluasi Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurusan Akuntansi: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Miranda, Andini. 2009. Sistem Akuntansi Aktiva Tetap Pada Pt.Pln Pesero Pembangunan Sumetra Bagian Utara. Jurusan Diploma Iii Akuntansi. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Mulalinda, Veronika. 2014. Efektifitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Asset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kabupaten Sitaro. Jurusan Akuntansi: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Ningsih, Fitri. 2013. Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Pendalian IV Kota Kabupaten Rokan Hulu. Jurusan Akuntansi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Permadi, Angga Dwi. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada dinas bina marga provinsi jawa barat). Jurusan Akuntansi: Universitas Widyatama Bandung.
- Rajindra, Burhanuddin, Rasmi Nur Anggaraeni, Nasrullah Akkas, and Ahmad Yani. 2020. "Effect of Funding Policy and Working Capital on Financial Performance." *Journal of Engineering and Applied Sciences* 15(3): 847–50.
- Rajindra, Rajindra. 2021. "Strategi Manajemen Pengelolaan Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Donggala, Indonesia." *Jurnal Sinar Manajemen* 8(1): 14–22.
- Rajindra, Rajindra, Mohamad Andri, and Ahmad Yani. 2020. "Quality of Health Services in the Family Planning Program in Donggala Regency, Indonesia." *Systematic Reviews in Pharmacy* 11(11).
- Rajindra, Rajindra, and Rasmi Nur Anggraeni. 2019. "Costly Fees, Men's Participation in Family

- Planning Declines.” *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 1(1): 5–8.
- Rajindra, Rajindra, Guasmin Guasmin, and Burhanuddin Burhanuddin. 2020. “Financial Performance Analysis of Shares Returns in Cosmetics and Household Purposes Companies (Studies on Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange).” *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 2(4): 196–204.
- RAJINDRA, Rajindra, Guasmin GUASMIN, Burhanuddin BURHANUDDIN, and Rasmi Nur ANGGRAENI. 2021. “Costs and Operational Revenue, Loan to Deposit Ratio Against Return on Assets: A Case Study in Indonesia.” *The Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8(5): 109–15.
- Suryanovi, Sri. 2010. *Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPD*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan PUSDIKLAT Kekayaan Negara Dan Perimbangan Keuangan
- Tandaju, Ivana Penggei. 2015. *Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern Siklus Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurusan Akuntansi: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Yanis, Irene Sutri. 2015. *Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 Pada Dinas Pendidikan Kota Manado*. Jurusan Akuntansi: Universitas Sam Ratulangi Manado